

BAB III

PARADIGMA FEMINISME LIBERAL

A. Kategori Gerakan Feminisme

Perbedaan pengalaman setiap orang melahirkan perbedaan pengetahuan dan juga perbedaan pandangan dunia. Oleh karena itu, suatu pemikiran, katakanlah pemikiran feminisme, juga mempunyai perspektif yang berbeda-beda. Masing-masing perspektif mencoba mendeskripsikan keterbelakangan atau opresi yang dialami oleh perempuan dan menjelaskan sebab-sebabnya; apa saja konsekuensi dari keterbelakangan atau opresi tersebut, serta mengemukakan strategi mereka untuk membebaskan diri dari keterbelakangan itu. Feminisme mencakup sekumpulan analisis dan strategi aksi yang bisa dikategorisasikan, secara umum sebagai berikut:

1. Feminisme Liberal

Feminisme Liberal pertama kali dirumuskan oleh Mary Wollstonecraft (1759-1799) dalam tulisannya *A Vindication of the Rights of Women* (Feminis Liberal abad ke-18) dan John Stuart Mill dalam tulisannya *The Subjection of Women* (Feminis Liberal abad ke-19), kemudian Betty Friedan dalam tulisannya *The Feminine Mystique* dan *The Second Stage*. Penekanan mereka adalah bahwa subordinasi perempuan itu berakar dalam keterbatasan hukum dan adat yang

menghalangi perempuan untuk masuk ke lingkungan publik. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan, karena kondisi alamiah yang dimilikinya, kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik dibandingkan laki-laki. Oleh karena itu, perempuan dianggap tidak mampu menjalankan peran di lingkungan publik.

Anggapan tersebut disangkal oleh feminisme liberal yang mendasarkan pemikirannya pada konsep liberal tentang hakikat manusia yang mengatakan bahwa yang membedakan manusia dari binatang adalah kemampuan yang dimiliki oleh manusia, seperti rasionalitas, yang mempunyai dua aspek yaitu *moralitas* (pembuat keputusan yang otonom) dan *prudentialitas* (pemenuh kebutuhan diri sendiri). Manusia, perempuan dan laki-laki, diciptakan sama dan mempunyai hak yang sama, dan harus pula mempunyai kesempatan yang sama untuk memajukan dirinya.¹

Mereka setuju bahwa suatu masyarakat yang adil akan memungkinkan seorang individu untuk menunjukkan otonominya, dan juga untuk memuaskan dirinya. Menurut kaum liberal, "hak" harus diberikan sebagai prioritas di atas "kebaikan" dengan perkataan lain, keseluruhan system atas hak individu dibenarkan, karena hak ini menghasilkan bingkai kerja, yang merupakan dasar bagi kita untuk

¹ Rosemarie Putnam Tong, *Feminist Thought*, (Yogyakarta: Jalasutra, 2008), 16

memilih apa yang terbaik bagi kita masing-masing, selama kita tidak merampas hak orang lain.

Wollstonecraft menyangkal adanya pandangan bahwa kondisi alamiah perempuan menyebabkan perempuan kurang memiliki intelektualitas dan kemampuan fisik seperti laki-laki. Agar perempuan dapat berkembang seperti laki-laki, maka perempuan harus berpendidikan sama seperti laki-laki. Berbeda dengan Wollstonecraft, J.S Mill dan Harriet Taylor-Mill (suami-istri) seratus tahun kemudian berpendapat agar persamaan antara laki-laki dan perempuan tercapai, perempuan tidak hanya harus diberi kesempatan yang sama dalam pendidikan, tetapi perlu pula berperan serta dalam kegiatan ekonomi dan mempunyai hak sipil sama seperti laki-laki. Hal ini dikemukakan sebab menurut keduanya, individu harus diberi hak untuk mengejar apa yang diinginkan, dengan syarat mereka tidak saling menjegal dalam usaha pencapaian apa yang diinginkannya.²

Sejarah feminisme dimulai pada abad 18, pada abad tersebut sering muncul tuntutan agar perempuan mendapat pendidikan yang sama, kemudian di abad 19 feminisme banyak berupaya memperjuangkan kesempatan hak sipil dan ekonomi bagi perempuan, dan di abad 20

² T.O Ihromi, *Kajian Wanita Dalam Pembangunan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1995), 87

organisasi-organisasi perempuan mulai dibentuk untuk menentang diskriminasi seksual di bidang politik, sosial, ekonomi, maupun personal.

Susan Wendell (bukan seorang feminis liberal) menggambarkan pemikiran feminis liberal, ditegaskannya sebagai pemikiran yang "berkomitmen kepada pengaturan ulang ekonomi secara besar-besaran, dan redistribusi kemakmuran secara lebih signifikan, karena salah satu dari tujuan politik modern yang paling dekat dengan feminisme liberal adalah kesetaraan kesempatan, yang tentu saja akan menuntut dan juga membawa kepada kedua komitmen tersebut". Tujuan umum dari feminisme liberal adalah untuk menciptakan "masyarakat yang adil dan peduli tempat kebebasan berkembang". Hanya di dalam masyarakat seperti itu, perempuan dan laki-laki dapat mengembangkan diri.³ Perhatian penting gerakan feminisme liberal pada abad ini adalah pada kesetaraan kesempatan dalam hal pekerjaan, mereka menuntut persamaan hak serta kedudukan di bidang ekonomi dan pekerjaan.

Tokoh feminis liberal ini adalah Naomi Wolf, sebagai "Feminisme Kekuatan" yang merupakan solusi. Kini perempuan telah mempunyai kekuatan dari segi pendidikan dan pendapatan, dan perempuan harus terus menuntut persamaan haknya serta saatnya kini perempuan bebas berkehendak tanpa tergantung pada lelaki.

³ Asmaeni Aziz, *Feminisme Profetik* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), 69

Berikut ini kami jelaskan sekilas beberapa kategori feminisme yang lain. Karena fokus kajian kami hanya pada feminisme liberal yang telah kami jelaskan di atas, maka kategori feminisme yang lain akan kami jelaskan singkat saja, untuk memahami arah gerakan feminisme tersebut.

2. Feminisme Marxis

Bertolak dari konsep marxis tentang hakikat manusia (human nature) dan teori marxis tentang masyarakat, ekonomi dan politik, serta teori Engels tentang keluarga, yang mencoba untuk memahami mengapa perempuan tidak pernah memperoleh kesempatan yang sama dengan laki-laki, dengan menganalisis hubungan antara status pekerjaan perempuan dengan citra diri perempuan.⁴

Fokus feminisme marxis mereka berkisar pada hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan perempuan, bagaimana pranata keluarga dikaitkan dengan sistem kapitalisme, bagaimana pekerjaan perempuan dalam mengurus rumah tangga tidak dianggap penting dan dianggap bukan pekerjaan, bagaimana para perempuan itu jika terjun dalam pasar tenaga kerja diberi pekerjaan yang membosankan dan memperoleh upah yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

3. Feminisme Radikal

feminis radikal memberikan perhatiannya kepada permasalahan perempuan yang berkaitan dengan masalah reproduksi dan seksualitas

⁴ Tong, *Feminist Thought...*, 140

perempuan. Asumsi dasar perspektif ini adalah patriarki, yaitu sistem kekuasaan dalam keluarga dan masyarakat, yang menyebabkan keterbelakangan perempuan.⁵ Oleh karena itu, sistem patriarki ini tidak saja harus dirombak, tetapi juga harus dicabut sampai ke akarnya. Menurut feminisme radikal untuk memahami mengapa perempuan berada dalam posisi subordinate terhadap laki-laki, diperlukan penjelasan biologis, bukan penjelasan ekonomi.

4. Feminisme Psikoanalisis

Feminisme Psikoanalisis bertolak dari teorinya Freud yang menekankan seksualitas adalah unsur yang krusial dalam pengembangan hubungan gender. Mereka menganalisis tahapan Pra-oedipus kompleks di mana hubungan ibu dan anak pada tahapan itu sangat kuat.⁶ berasumsi bahwa tahapan psikoseksual (tahapan perkembangan seksual biologis) adalah kunci untuk memahami bagaimana seksualitas dan gender yang timpang, di mana laki-laki berada pada posisi superordinat.

5. Feminisme Sosialis

Perspektif ini muncul karena ketidak puasan terhadap analisis feminis Marxis yang pada intinya berdasarkan pada pemikiran marxis yang buta gender. Artinya, masalah kelas sosial tidak ada sangkut pautnya

⁵ Konsep patriarki diangkat oleh Max Weber untuk menjelaskan bentuk organisasi rumah tangga di mana ayah tokoh yang dominant dalam rumah tangga dan menguasai anggota rumah tangga (perempuan dan laki-laki) dan juga menguasai produksi rumah tangga. Ihromi, *Kajian Wanita dalam Pembangunan....*, 93

⁶ Ibid., 101

dengan masalah gender yang hidup dalam masyarakat. Feminis sosialis muncul untuk menciptakan posisi yang sederajat dengan kepentingan modal dan kekuasaan. Artinya feminis menuntut keadilan atas kelas borjuasi yang memiliki modal untuk tidak membedakan mereka dalam pemberian upah dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk cuti kerja sesuai dengan kebutuhan, seperti cuti haid, cuti hamil, dan cuti menyusui anak. Sekaligus upah kerja antara mereka dengan laki-laki tidak dibedakan.⁷

6. Feminisme Posmodernis

Ide *postmo* ialah ide yang anti absolut dan anti otoritas, gagalnya modernitas karena penentangannya pada penguniversalan pengetahuan ilmiah dan sejarah. Mereka berpendapat bahwa gender tidak bermakna identitas atau struktur sosial, tetapi lebih dalam makna diskursus. Berawal dari kefrustasian inilah mereka kemudian merumuskan bahwa "semua kebenaran itu relatif", kebenaran yang mutlak tidak ada. Dengan demikian, konsepsi tentang pembebasan perempuan kemudian dikembalikan pada pengalaman masing-masing individu. Mereka percaya bahwa pembebasan perempuan itu hanya dapat terjadi jika semua perempuan sudah dapat "menemukan konsepsi mereka sendiri tentang pembebasan perempuan".

⁷ Aziz, *Feminisme Profetik...*, 93

Kategori-kategori feminisme ini memang tidak pas betul dan bahkan bisa merugikan feminisme karena menggariskan pembagian-pembagian yang tidak bermanfaat dan kaku. Bagaimanapun sebagai alat penjelas, kategori-kategori ini bisa menunjukkan variasi dalam asumsi-asumsi dasar dan penekanan tentang apa yang menjadi kepentingan perempuan.⁸

B. Paradigma di Balik Teori Feminisme Liberal; Paradigma Fungsionalis

Teori feminisme adalah sebuah generalisasi dari berbagai sistem gagasan mengenai kehidupan sosial dan pengalaman manusia yang dikembangkan dari perspektif yang terpusat pada wanita. Dalam hal ini teori yang digunakan oleh paradigma feminisme liberal adalah berasal dari paradigma *fungsionalisme struktural* atau sering disebut aliran *fungsionalisme*, adalah mazhab arus utama dalam ilmu sosial yang dikembangkan oleh Talcott Parsons dan Robert Merton.

Teori ini memang tidak secara langsung menyinggung masalah kaum perempuan. Namun keyakinan mereka bahwa masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan (agama, pendidikan, struktur politik sampai keluarga) dan masing-masing bagian secara terus-menerus mencari keseimbangan (*equilibrium*) dan harmoni, dapat menjelaskan posisi mereka tentang kaum perempuan. Interelasi itu terjadi karena konsensus, yakni sistem dan kultur yang diciptakan oleh masyarakat. Pola yang non-normatif dianggap akan melahirkan gejolak. Jika hal tersebut terjadi, maka masing-

⁸ Ibid., 48

masing bagian berusaha secepatnya menyesuaikan diri untuk mencapai keseimbangan kembali. Bagi penganut teori ini, masyarakat berubah secara evolusioner. Konflik dalam suatu masyarakat dilihat sebagai tidak berfungsinya integrasi sosial dan keseimbangan. Oleh karena itu harmoni dan integrasi dipandang sebagai fungsional, bernilai tinggi dan harus ditegakkan, sedangkan konflik mesti dihindarkan. Maka, *status quo* harus dipertahankan. Jadi, teori ini menolak setiap usaha yang akan menggoncang *status quo*, termasuk yang berkenaan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat. Mereka melihat bahwa kondisi yang ada adalah normal dan sehat, oleh sebab itu tidak diperlukan perubahan. Jika perubahan memang terpaksa mesti terjadi, yang diperlukan adalah "reformasi" yang terkontrol, tetapi jangan sampai mengganggu stabilitas sosial.⁹ Teori fungsionalisme memandang masyarakat sebagai sistem tatanan yang saling berkaitan dan berinteraksi satu sama lain. Setiap bagian berpengaruh bagi bagian yang lain. Karena setiap sistem mempunyai peran sendiri-sendiri dalam kedudukannya di dalam masyarakat.

Berikut ini kami jelaskan teori fungsionalisme yang berpengaruh terhadap teori feminisme liberal

1. Teori Sistem Sosial

Masyarakat adalah suatu sistem yang terdiri atas bagian dan saling berkaitan. Parsons menyebutnya sebagai *sistem sosial* yang berawal pada

⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 81.

interaksi tingkat mikro antara ego dan alter-ego yang didefinisikan sebagai bentuk sistem sosial paling mendasar. Teori fungsionalisme menyebutnya sebagai status peran, yakni penyatuan ego dengan nilai dan norma yang ada ke dalam setiap diri individu, sehingga setiap tingkah laku individu sesuai dengan nilai dan norma yang telah ditetapkan.

Fungsionalisme-struktural Parsons mendefinisikan sistem sosial sebagai berikut:

"Sistem sosial terdiri dari sejumlah aktor-aktor individual yang *saling berinteraksi* dalam situasi yang sekurang-kurangnya mempunyai aspek lingkungan atau fisik, aktor-aktor yang mempunyai motivasi dalam arti mempunyai kecenderungan untuk '*mengoptimalkan kepuasan*', yang hubungannya dengan situasi mereka didefinisikan dan dimediasi dalam term sistem simbol bersama yang terstruktur secara kultural"¹⁰

Definisi ini mencoba menetapkan sistem sosial menurut konsep-konsep kunci dalam karya Parsons, yakni aktor, interaksi, lingkungan, optimalisasi kepuasan, dan kultur. Meski Parsons berkomitmen untuk melihat sistem sosial sebagai sebuah interaksi, namun ia tak menggunakan interaksi sebagai unit fundamental dalam studi tentang sistem sosial (seperti juga yang diungkapkan oleh Merton). Ia malah menggunakan *status-peran*

¹⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005),

sebagai unit dasar dari sistem. Konsep ini bukan merupakan satu aspek dari aktor atau aspek interaksi, tetapi lebih merupakan komponen struktural dari sistem sosial. *Status* mengacu pada posisi struktural di dalam sistem sosial, dan *peran* adalah apa yang dilakukan aktor dalam posisinya itu, dilihat dalam konteks signifikansi fungsionalnya untuk sistem yang lebih luas. Aktor tidak dilihat dari sudut pikiran dan tindakan, tetapi dilihat tak lebih dari sebuah kumpulan beberapa status dan peran (sekurang-kurangnya dilihat dari sudut posisi di dalam sistem sosial). Status peran merupakan posisi yang dimiliki oleh individu dalam masyarakat, peran perempuan menempatkannya pada posisi sebagai ibu rumah tangga yang mempunyai kegiatan merawat anak dan suami serta kegiatan rumahtangga, sedangkan laki-laki menempati posisi publik atau pekerjaan yang mempunyai kegiatan mencari nafkah untuk menghidupi anak dan istrinya di dalam rumah. Status-peran tersebut sudah ditentukan oleh masyarakat dalam suatu nilai atau norma dalam sebuah kultur budaya yang sudah ada. Suatu tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai yang telah ditentukan akan menimbulkan konflik yang berpotensi mengganggu kestabilan, karena itu konflik harus dihindarkan untuk mempertahankan posisi masing-masing sistem dalam masyarakat sosial.

Dalam analisisnya tentang sistem sosial, Parsons terutama tertarik pada komponen-komponen strukturalnya (fokus utama teori fungsionalisme struktural), yakni sistem-sistem yang terstruktur dalam masyarakat sosial.

Disamping memusatkan perhatian pada status-peran, teori fungsionalisme memperhatikan komponen sistem sosial berskala luas seperti kolektivitas, norma dan nilai. Parsons menjelaskan sejumlah persyaratan fungsional dari sistem sosial. *Pertama*, sistem sosial harus terstruktur (ditata) sedemikian rupa sehingga bisa beroperasi dalam hubungan yang harmonis dengan sistem lainnya. *Kedua*, untuk menjaga kelangsungan hidupnya, sistem sosial harus mendapat dukungan yang diperlukan dari sistem yang lain. *Ketiga*, sistem sosial harus mampu memenuhi kebutuhan para aktornya dalam proporsi yang signifikan. *Keempat*, sistem harus mampu melahirkan partisipasi yang memadai dari para anggotanya. *Kelima*, sistem sosial harus mampu mengendalikan perilaku yang berpotensi mengganggu. *Keenam*, bila konflik akan menimbulkan kekacauan, itu harus dikendalikan. *Ketujuh*, untuk kelangsungan hidupnya, sistem sosial memerlukan bahasa.¹¹

Jelas dalam diskusi tentang persyaratan fungsional sistem sosial bahwa fungsionalisme memusatkan perhatian pada sistem sosial berskala luas dan pada hubungan antara berbagai sistem sosial luas itu (fungsionalisme kemasyarakatan). Ketika Parsons berbicara mengenai aktor, itu pun dari sudut pandang sistem. Bahasanya pun mencerminkan perhatian terhadap pemeliharaan keteraturan di dalam sistem sosial.

Dalam menganalisis sistem sosial, Parsons dan Merton memperhatikan masalah hubungan antara aktor dan struktur sosial. Ia

¹¹ Ibid., 125

sebenarnya menganggap integrasi pola nilai dan kecenderungan kebutuhan sebagai "dalil dinamis fundamental sosiologi". Menurutnya, persyaratan kunci bagi terpeliharanya integrasi pola nilai di dalam sistem adalah proses internalisasi dan sosialisasi. Parsons tertarik pada cara mengalihkan norma dan nilai sistem sosial kepada aktor di dalam sistem sosial itu yang kemudian diikuti oleh Merton. Dalam proses sosialisasi yang berhasil, norma dan nilai itu diinternalisasikan (*internalized*); artinya, norma dan nilai itu menjadi bagian dari "kesadaran" aktor. Akibatnya, dalam mengejar kepentingan mereka sendiri itu, aktor sebenarnya mengabdikan kepada kepentingan sistem sebagai satu kesatuan.¹²

Meski ada penyesuaian yang diakibatkan oleh sosialisasi seumur hidup, namun tetap ada sejumlah besar perbedaan individual di dalam sistem (yang biasanya melahirkan ketegangan-ketegangan atau konflik). Masalahnya adalah: mengapa perbedaan individual ini biasanya tidak menjadi problem besar bagi sistem sosial, padahal sistem sosial memerlukan keteraturan?

Pertama, sejumlah mekanisme pengendalian sosial dapat digunakan untuk mendorong kearah penyesuaian. Tetapi menurut fungsionalisme-struktural, pengendalian sosial adalah pertahanan lapis kedua. Sebuah sistem sosial berjalan dengan baik bila pengendalian sosial hanya digunakan dengan hemat. Kedua, sistem sosial harus mampu menghormati

¹² Ibid., 126.

perbedaan, bahkan penyimpangan tertentu. Sistem sosial yang lentur (*flexible*) lebih kuat ketimbang yang kaku, yang tak dapat menerima penyimpangan. Ketiga, sistem sosial harus menyediakan berbagai jenis peluang untuk berperan yang memungkinkan bermacam-macam kepribadian yang berbeda untuk mengungkapkan diri mereka sendiri tanpa mengancam integritas sistem.

Sosialisasi dan kontrol sosial adalah mekanisme utama yang memungkinkan sistem sosial mempertahankan keseimbangannya. Individualitas dan penyimpangan diakomodasi, tetapi bentuk-bentuk yang lebih ekstrim harus ditangani dengan mekanisme penyeimbangan ulang (*reequilibrating*). Menurut Parsons, keteraturan sosial sudah tercipta di dalam struktur sistem sosial itu sendiri: "tanpa rencana sengaja dari siapa pun di dalam sistem sosial berkembang mekanisme yang mampu membalikkan dan mencegah kecenderungan penyimpangan menjadi lingkaran setan yang berada di luar kontrol persetujuan-ketidaksetujuan dan sanksi imbalan-hukuman". Jelas bahwa nilai *kepuasan* diri terletak pada penyatuan diri dengan norma dan nilai yang ada. Dan tetap menjaga keseimbangan struktur yang sudah tertata dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan.

2. Rasionalitas Dalam Teori Fungsionalisme Struktural

Teori Fungsionalisme mendefinisi manusia rasional sebagai manusia yang bertindak atas dasar norma-norma untuk kepentingan

bersama dan juga menurut tipe ideal bersama di masa depan. Parsons mengungkapkan dalam makalahnya bahwa,

"Suatu tujuan itu dianggap sebagai suatu antisipasi yang *dirumuskan secara logis* bagi adanya unsur-unsur tertentu dalam suatu keadaan masa depan, ...Yang dirumuskannya ialah suatu *norma* tindakan rasional. Relevansi empirisnya terletak pada pandangan bahwa makhluk-makhluk manusia nyatanya memang berjuang untuk merealisasikan tujuan-tujuan dan melakukannya dengan penerapan sarana-sarana secara rasional bagi tujuan-tujuan itu. ...konsep tindakan itu sendiri tidak memiliki arti selain tujuan-tujuan "riil", ...di pihak lain tindakan juga tidak memiliki arti kecuali rintangan-rintangan yang harus diatasi dengan usaha dalam merealisasikan norma. ...realisasi tujuan-tujuan akhir dari tindakan itu sangat dirasakan sebagai satu masalah kewajiban moral, yang akan mengikat bagi perorangan, memang bukan dalam arti keharusan fisis, tetapi tetap mengikat. Meratanya konsep kewajiban ini barang kali cukup membuktikan hal ini (rasionalitas norma)."¹³

Oleh karena itu norma dan nilai yang dibentuk oleh masyarakat adalah suatu hal yang rasional dan riil untuk tujuan bersama di masa depan. Merton mengungkapkan juga bahwa pada hakikatnya manusia tidak terikat pada satu perangkat kewajiban tertentu, namun semua itu adalah karena dorongan ego. Sumber kewajiban-kewajiban moral tidak bisa diambil dari sifat-sifat empiris 'hakikat manusiawi' seperti yang

¹³ Peter Hamilton, *Talcott Parsons dan Pemikirannya, Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Tiara wacana, 1990), 57

diungkapkan oleh psikologi ilmiah, karena ini merupakan bagian dunia luar yang sama seperti lingkungan, maka titik pandang subyektifnya adalah titik pandang *ego* bukannya tubuh, atau bahkan 'pikiran'. Psikologi mungkin mengungkapkan manusia itu sebagai suatu makhluk yang mematuhi kewajiban-kewajiban moral. Tetapi menurut hakikatnya tidak terikat pada satu perangkat kewajiban tertentu. Lagipula, penjelasan ini akan mengingkari rasa batin mengenai kebebasan pilihan moral, yang sama-sama merupakan suatu kenyataan penting dalam kehidupan manusia, dan juga pertanggung jawaban moral yang menyertainya.¹⁴

Merton mengungkapkan bahwa sejauh yang menyangkut tujuan-tujuan ideal bersama ini, secara langsung ataupun berdasar implikasi logis, maka hubungan-hubungan para anggota kelompok dengan anggota lainnya, harus berdasar pada norma-norma yang diacukan. hubungan-hubungan ini harus dipahami dalam kerangka-kerangka sistem umum dari tujuan-tujuan purna.

3. Jenis Kelamin

Mengenai perbedaan jenis kelamin, Parsons mengatakan dalam esainya¹⁵ bahwa tidak ada perbedaan jenis kelamin dalam proses pendidikan formal paling tidak kalau pendidikan itu jelas-jelas bukan

¹⁴ Ibid., 59.

¹⁵ Talcott Parsons, "Usia Dan Jenis Kelamin Dalam Struktur Sosial Amerika Serikat" dalam *Talcott Parsons dan Pemikirannya Sebuah Pengantar*, ed. Peter Hamilton (Yogyakarta: Tiara wacana, 1990), 109

pendidikan kejuruan. Sampai tingkat pendidikan tinggi, perbedaan-perbedaan tampaknya terutama merupakan masalah kecakapan individual, di satu pihak, dan status kelas di pihak lain, dan hanya secara sekunder merupakan perbedaan jenis kelamin. Kita tentunya bisa berbicara mengenai suatu pola yang jelas terlihat bahwa semua anak-anak dalam suatu keluarga mempunyai suatu "hak" untuk memperoleh pendidikan yang baik, hak-hak yang digradasikan sesuai dengan status kelas keluarga tetapi juga menurut kecakapan perorangan. Hanya pada pendidikan profesional pasca-sarjana, yang berhubungan langsung dengan karir-karir jabat kerja di masa depan, yang mengalami diskriminasi jenis kelamin. Sangat penting untuk diperhatikan bahwa persamaan perlakuan ini terjadi dalam lingkup pendidikan liberal karena di seluruh struktur sosial masyarakat kita terdapat kecenderungan kuat untuk memisah-misahkan lingkungan jabat kerja dari lingkungan pribadi dimana pola-pola dan nilai-nilai kemanusiaan tertentu yang lebih umum adalah dominan.¹⁶ Parsons mengakui bahwa basis fundamental dari suatu masyarakat adalah basis keluarga, karena keluarga adalah pusat kehidupan masyarakat.

Sedangkan, dalam suatu anggapan tertentu, status jabatkerja sebagai posisi *primer*¹⁷ bisa dianggap sebagai sumber utama ketegangan dalam

¹⁶ Ibid., 111.

¹⁷ Dalam suatu pengertian tertentu basis yang paling fundamental dari status keluarga adalah status jabatkerja suami atau ayah. Ini adalah status yang dipegang oleh seseorang berkat kualitas-kualitas dan pencapaian-pencapaian individual yang menentukan status keluarga dalam struktur sosial.

struktur peran jenis kelamin masyarakat kita karena hal itu menghilangkan peran istri sebagai partner dalam suatu usaha bersama (pekerjaan di luar rumah yang dilakukan oleh suami dan istri). Usaha bersama ini berkurang menjadi hanya kehidupan keluarga itu sendiri dan kegiatan-kegiatan informal yang dihayati bersama oleh suami dan istri. Ini memberikan kepada istri seperangkat fungsi-fungsi utilitarian dalam pengurusan rumah tangga yang bisa disebut sebagai semacam pekerjaan "semu". Karena perhatian yang ada sekarang terutama pada kelas-kelas menengah, maka tidak mantapnya karakter peran ibu rumahtangga sebagai bagian utama peran perempuan itu tergambar jelas oleh kecenderungan untuk mempekerjakan pelayan-pelayan domestik kalau keuangan memungkinkan. Namun pengorganisasian fungsi ibu rumahtangga dengan menambahkan pengabdian penuh kasih kepada suami dan anak-anak, adalah fokus utama salah satu pola-pola pokok yang mengatur peran feminin dewasa, yang bisa disebut sebagai pola "domestik". Namun merupakan fakta bahwa kepatuhan ketat pada pola ini telah menjadi semakin jarang dan pola itu kemudian berstatus sampingan saja, yaitu hanya diikuti oleh mereka yang tidak berhasil dalam kompetisi memperebutkan prestis di bidang-bidang lain (pekerjaan).

Tentu saja mungkin bagi wanita dewasa untuk mengikuti pola maskulin dan mencari karir dalam bidang-bidang pencapaian jabatankerja dengan kaum pria yang sekelas. Namun harus diperhatikan bahwa

walaupun terjadi kemajuan besar dalam persamaan hak wanita dari pola domestik tradisional, hanya sebagian sangat kecil yang benar-benar maju dalam bidang karir tersebut. Juga jelas bahwa generalisasinya hanya mungkin tanpa perubahan-perubahan besar dalam struktur keluarga.¹⁸

¹⁸ Hamilton, *Talcott Parsons...*, 114.